



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatuesahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah BPMPD Kabupaten Muna.
17. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara:

- a. secara merata, dimana sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang masuk di Kabupaten Muna dibagi secara merata pada setiap Desa;
- b. secara proporsional, dimana sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang masuk di Kabupaten Muna, dibagi secara proporsional dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Muna

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Muna

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I (pertama) pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III (ketiga) pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret dan mengajukan proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKAD, usulan tersebut sebelum diajukan kepada Bupati terlebih dahulu diajukan kepada Kepala BPMPD untuk diverifikasi kelengkapan dokumen syarat pencairan;
 - b. kelengkapan dokumen syarat pencairan Dana meliputi:
 1. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKAD;
 2. fotokopi APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016;
 3. rincian rencana penggunaan dana tahap I sampai tahap III;
 4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 5. lembar verifikasi kelengkapan syarat pencairan dari Kepala BPMPD.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada ayat (4) dalam pengajuan dana tahap II.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III (ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II (kedua) dan mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada ayat (4) dalam pengajuan dana tahap III.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan tipologi Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Bersalin Desa (Polindes) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke RKUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada Bupati melalui BPMPD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 - 4 - 2016

Pj. BUPATI MUNA,


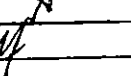
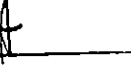


MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 1 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR 07

PARAF KOORDINAS.	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 07 TAHUN 2016

TANGGAL 1 - 4 - 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
1	NAPALAKURA	570,201,612.90	1104	0.0080	0.0020	360	1.149%	0.40%	10.74	0.70%	0.07%	34.58	0.663%	0.20%	0.87%	52,897,103	623,099,000
2	PENTIRO	570,201,612.90	606	0.0044	0.0011	60	0.192%	0.07%	29.78	1.94%	0.19%	35.93	0.689%	0.21%	0.58%	35,056,298	605,258,000
3	LANGKUMAPO	570,201,612.90	831	0.0060	0.0015	188	0.600%	0.21%	13.67	0.89%	0.09%	28.89	0.554%	0.17%	0.62%	37,389,034	607,591,000
4	LAMBIKU	570,201,612.90	1196	0.0086	0.0022	244	0.779%	0.27%	20.47	1.33%	0.13%	32.35	0.621%	0.19%	0.81%	49,091,306	619,293,000
5	LANGKORONI	570,201,612.90	498	0.0036	0.0009	112	0.358%	0.13%	4.69	0.30%	0.03%	55.57	1.066%	0.32%	0.57%	34,360,213	604,562,000
6	LATOMPA	570,201,612.90	908	0.0066	0.0016	240	0.766%	0.27%	10.57	0.69%	0.07%	43.33	0.831%	0.25%	0.75%	45,588,809	615,790,000
7	RAIMUNA	570,201,612.90	1201	0.0087	0.0022	262	0.836%	0.29%	17.71	1.15%	0.12%	30.58	0.587%	0.18%	0.80%	48,663,696	618,865,000
8	MALIGANO	570,201,612.90	1259	0.0091	0.0023	345	1.101%	0.39%	16.38	1.06%	0.11%	44.05	0.845%	0.25%	0.97%	59,117,057	629,319,000
9	LAPOLE	570,201,612.90	1135	0.0082	0.0020	160	0.511%	0.18%	11.36	0.74%	0.07%	41.91	0.804%	0.24%	0.70%	42,464,086	612,666,000
10	POHARUA	570,201,612.90	726	0.0052	0.0013	204	0.651%	0.23%	16.91	1.10%	0.11%	59.89	1.149%	0.34%	0.81%	49,448,096	619,650,000
11	WAMBONA	570,201,612.90	1185	0.0086	0.0021	295	0.942%	0.33%	46.52	3.02%	0.30%	37.56	0.721%	0.22%	1.06%	64,548,227	634,750,000
12	BAKEALU	570,201,612.90	347	0.0025	0.0006	11	0.035%	0.01%	3.71	0.24%	0.02%	64.51	1.238%	0.37%	0.47%	28,586,769	598,788,000
13	PURE	570,201,612.90	829	0.0060	0.0015	136	0.434%	0.15%	11.50	0.75%	0.07%	52.82	1.013%	0.30%	0.68%	41,350,638	611,552,000
14	WAKORUMBA	570,201,612.90	555	0.0040	0.0010	55	0.176%	0.06%	9.84	0.64%	0.06%	38.36	0.736%	0.22%	0.45%	27,131,946	597,334,000
15	BANGUN SARI	570,201,612.90	1782	0.0093	0.0023	85	0.271%	0.09%	22.56	1.47%	0.15%	28.03	0.538%	0.16%	0.63%	38,552,327	608,754,000
16	LABONE	570,201,612.90	2525	0.0182	0.0046	328	1.047%	0.37%	24.78	1.61%	0.16%	36.91	0.708%	0.21%	1.20%	72,677,562	642,879,000
17	BONEA	570,201,612.90	1755	0.0127	0.0032	342	1.092%	0.38%	9.22	0.60%	0.06%	41.57	0.797%	0.24%	1.00%	60,661,117	630,863,000
18	KOMBUNGO	570,201,612.90	936	0.0068	0.0017	339	1.082%	0.38%	29.30	1.90%	0.19%	42.76	0.820%	0.25%	0.98%	59,819,065	630,021,000
19	LABUNTI	570,201,612.90	2371	0.0171	0.0043	420	1.341%	0.47%	7.36	0.48%	0.05%	29.34	0.563%	0.17%	1.11%	67,707,976	637,910,000
20	PARIDA	570,201,612.90	1062	0.0077	0.0019	268	0.856%	0.30%	5.04	0.33%	0.03%	31.18	0.598%	0.18%	0.70%	42,746,627	612,948,000
21	LASALEPA	570,201,612.90	1396	0.0101	0.0025	174	0.555%	0.19%	7.15	0.46%	0.05%	38.40	0.737%	0.22%	0.71%	43,387,909	613,590,000
22	WAWESA	570,201,612.90	1859	0.0134	0.0034	328	1.047%	0.37%	6.65	0.43%	0.04%	32.21	0.618%	0.19%	0.93%	56,563,359	626,765,000
23	WAKORAMBU	570,201,612.90	1122	0.0081	0.0020	151	0.482%	0.17%	4.16	0.27%	0.03%	35.57	0.682%	0.20%	0.60%	36,650,096	606,852,000
24	GHONSUME	570,201,612.90	1411	0.0102	0.0025	172	0.549%	0.19%	2.13	0.14%	0.01%	42.62	0.818%	0.25%	0.71%	42,912,675	613,114,000
25	LAGASA	570,201,612.90	2528	0.0183	0.0046	205	0.654%	0.23%	1.11	0.07%	0.01%	42.92	0.823%	0.25%	0.94%	57,113,544	627,315,000
26	GHONE BALANO	570,201,612.90	743	0.0054	0.0013	124	0.396%	0.14%	0.98	0.06%	0.01%	49.05	0.941%	0.28%	0.56%	34,117,025	604,319,000
27	LASUNAPA	570,201,612.90	1165	0.0084	0.0021	215	0.686%	0.24%	1.94	0.13%	0.01%	42.83	0.822%	0.25%	0.71%	43,132,170	613,334,000
28	BANGGAI	570,201,612.90	1480	0.0107	0.0027	201	0.642%	0.22%	2.59	0.17%	0.02%	37.18	0.713%	0.21%	0.72%	43,916,330	614,118,000
29	LIANGKOBORI	570,201,612.90	1441	0.0104	0.0026	472	1.507%	0.53%	4.10	0.27%	0.03%	30.18	0.579%	0.17%	0.99%	60,039,111	630,241,000
30	BOLO	570,201,612.90	1648	0.0119	0.0030	307	0.980%	0.34%	3.66	0.24%	0.02%	29.32	0.563%	0.17%	0.83%	50,632,237	620,834,000
31	KONDONGIA	570,201,612.90	2001	0.0145	0.0036	536	1.711%	0.60%	8.04	0.52%	0.05%	30.66	0.588%	0.18%	1.19%	72,253,071	642,455,000
32	WAARA	570,201,612.90	1080	0.0078	0.0020	231	0.737%	0.26%	3.51	0.23%	0.02%	22.43	0.430%	0.13%	0.60%	36,765,484	606,967,000
33	MANTOBUA	570,201,612.90	2058	0.0149	0.0037	837	2.672%	0.94%	4.99	0.32%	0.03%	30.53	0.586%	0.18%	1.51%	92,068,173	662,270,000
34	WABINTINGI	570,201,612.90	1067	0.0077	0.0019	224	0.715%	0.25%	6.10	0.40%	0.04%	29.56	0.567%	0.17%	0.65%	39,667,980	609,870,000
35	LOHIA	570,201,612.90	1664	0.0120	0.0030	172	0.549%	0.19%	8.04	0.52%	0.05%	36.10	0.693%	0.21%	0.75%	45,738,778	615,940,000
36	KORIHI	570,201,612.90	1473	0.0106	0.0027	749	2.391%	0.84%	5.21	0.34%	0.03%	45.62	0.875%	0.26%	1.40%	85,039,479	655,241,000
37	LAKARINTA	570,201,612.90	751	0.0054	0.0014	337	1.076%	0.38%	4.99	0.32%	0.03%	45.27	0.868%	0.26%	0.81%	48,928,808	619,130,000
38	WAKADIA	570,201,612.90	1043	0.0075	0.0019	242	0.773%	0.27%	12.73	0.83%	0.08%	29.13	0.559%	0.17%	0.71%	43,097,020	613,299,000
39	LAKAPODO	570,201,612.90	1640	0.0118	0.0030	209	0.667%	0.23%	37.55	2.44%	0.24%	45.20	0.867%	0.26%	1.03%	62,828,936	633,031,000
40	MATARAWA	570,201,612.90	836	0.0060	0.0015	142	0.453%	0.16%	15.79	1.03%	0.10%	47.62	0.914%	0.27%	0.69%	41,708,768	611,910,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (5) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (13) + (17)
41	LAKAUDUMA	570,201,612.90	1005	0.0073	0.0018	121	0.386%	0.14%	2.44	0.16%	0.02%	46.93	0.900%	0.27%	0.60%	36,624,206	606,826,000
42	BANGKALI	570,201,612.90	1494	0.0108	0.0027	235	0.750%	0.26%	4.04	0.26%	0.03%	50.25	0.964%	0.29%	0.85%	51,526,704	621,728,000
43	LABAHA	570,201,612.90	1003	0.0072	0.0018	96	0.306%	0.11%	4.98	0.32%	0.03%	48.72	0.935%	0.28%	0.60%	36,534,073	606,736,000
44	LIABALANO	570,201,612.90	1183	0.0085	0.0021	257	0.820%	0.29%	5.27	0.34%	0.03%	41.92	0.804%	0.24%	0.78%	47,178,617	617,380,000
45	LAPODIDI	570,201,612.90	437	0.0032	0.0008	53	0.169%	0.06%	6.09	0.40%	0.04%	41.04	0.787%	0.24%	0.41%	25,157,734	595,359,000
46	BUNGI	570,201,612.90	1686	0.0122	0.0030	691	2.206%	0.77%	13.56	0.88%	0.09%	34.38	0.660%	0.20%	1.36%	82,805,434	653,007,000
47	KONTUNAGA	570,201,612.90	1389	0.0100	0.0025	478	1.526%	0.53%	6.03	0.39%	0.04%	30.10	0.577%	0.17%	1.00%	60,606,036	630,808,000
48	MABODO	570,201,612.90	1963	0.0142	0.0035	507	1.618%	0.57%	10.97	0.71%	0.07%	29.67	0.569%	0.17%	1.16%	70,675,867	640,877,000
49	MASALILI	570,201,612.90	1226	0.0089	0.0022	177	0.565%	0.20%	7.76	0.50%	0.05%	39.50	0.758%	0.23%	0.70%	42,353,716	612,555,000
50	KOMBA KOMBA	570,201,612.90	965	0.0070	0.0017	184	0.587%	0.21%	19.54	1.27%	0.13%	51.18	0.982%	0.29%	0.80%	48,702,585	618,904,000
51	KABANGKA	570,201,612.90	660	0.0048	0.0012	112	0.358%	0.13%	3.31	0.22%	0.02%	41.53	0.797%	0.24%	0.50%	30,682,862	600,884,000
52	WAKOBULU AGUNG	570,201,612.90	1753	0.0127	0.0032	94	0.300%	0.11%	11.51	0.75%	0.07%	31.11	0.597%	0.18%	0.68%	41,049,273	611,251,000
53	LUPIA	570,201,612.90	1804	0.0130	0.0033	508	1.622%	0.57%	6.08	0.40%	0.04%	47.62	0.914%	0.27%	1.21%	73,349,236	643,551,000
54	SARIMULYO	570,201,612.90	1586	0.0115	0.0029	40	0.128%	0.04%	9.78	0.64%	0.06%	36.64	0.703%	0.21%	0.61%	36,801,295	607,003,000
55	OENSULI	570,201,612.90	924	0.0067	0.0017	64	0.204%	0.07%	22.18	1.44%	0.14%	37.64	0.722%	0.22%	0.60%	36,409,266	606,611,000
56	WANSUGI	570,201,612.90	865	0.0062	0.0016	304	0.970%	0.34%	15.00	0.97%	0.10%	40.84	0.784%	0.24%	0.83%	50,344,812	620,546,000
57	WATALIKU	570,201,612.90	462	0.0033	0.0008	85	0.271%	0.09%	3.12	0.20%	0.02%	51.72	0.992%	0.30%	0.50%	30,163,974	600,366,000
58	LAKANDITO	570,201,612.90	754	0.0054	0.0014	133	0.425%	0.15%	4.80	0.31%	0.03%	31.22	0.599%	0.18%	0.50%	30,123,920	600,326,000
59	TANJUNG BATU	570,201,612.90	967	0.0070	0.0017	353	1.127%	0.39%	56.77	3.69%	0.37%	44.66	0.857%	0.26%	1.19%	72,621,669	642,823,000
60	KAWITE WITE	570,201,612.90	989	0.0071	0.0018	416	1.328%	0.46%	23.94	1.56%	0.16%	46.03	0.883%	0.26%	1.06%	64,657,220	634,859,000
61	BENTE	570,201,612.90	882	0.0064	0.0016	170	0.543%	0.19%	8.46	0.55%	0.05%	54.12	1.038%	0.31%	0.72%	43,491,411	613,693,000
62	BEA	570,201,612.90	717	0.0052	0.0013	240	0.766%	0.27%	20.54	1.33%	0.13%	49.70	0.954%	0.29%	0.82%	49,659,873	619,861,000
63	RANGKA	570,201,612.90	543	0.0039	0.0010	118	0.377%	0.13%	6.79	0.44%	0.04%	36.30	0.696%	0.21%	0.48%	29,348,138	599,550,000
64	KAMBAWUNA	570,201,612.90	400	0.0029	0.0007	124	0.396%	0.14%	5.41	0.35%	0.04%	56.01	1.075%	0.32%	0.57%	34,537,747	604,739,000
65	KONTUMERE	570,201,612.90	2661	0.0192	0.0048	599	1.912%	0.67%	8.88	0.58%	0.06%	48.22	0.925%	0.28%	1.48%	90,247,425	660,449,000
66	LAMAE0	570,201,612.90	1077	0.0078	0.0019	360	1.149%	0.40%	7.77	0.51%	0.05%	55.60	1.067%	0.32%	0.97%	58,783,328	628,985,000
67	WANTIWORDO	570,201,612.90	1656	0.0120	0.0030	590	1.883%	0.66%	19.98	1.30%	0.13%	33.93	0.651%	0.20%	1.28%	77,993,251	648,195,000
68	KASAKA	570,201,612.90	913	0.0066	0.0016	219	0.699%	0.24%	13.48	0.88%	0.09%	55.83	1.071%	0.32%	0.82%	49,740,423	619,942,000
69	LABULU BULU	570,201,612.90	867	0.0063	0.0016	95	0.303%	0.11%	9.90	0.64%	0.06%	45.97	0.882%	0.26%	0.59%	35,956,781	606,158,000
70	LATAMPU	570,201,612.90	369	0.0027	0.0007	162	0.517%	0.18%	4.07	0.26%	0.03%	58.76	1.127%	0.34%	0.61%	37,212,201	607,414,000
71	LAIBA	570,201,612.90	1904	0.0138	0.0034	744	2.375%	0.83%	6.09	0.40%	0.04%	42.80	0.821%	0.25%	1.46%	88,791,405	658,993,000
72	WARAMBE	570,201,612.90	1124	0.0081	0.0020	284	0.907%	0.32%	9.11	0.59%	0.06%	45.38	0.871%	0.26%	0.84%	51,090,666	621,292,000
73	PARIGI	570,201,612.90	973	0.0070	0.0018	308	0.983%	0.34%	20.49	1.33%	0.13%	51.62	0.990%	0.30%	0.95%	57,738,996	627,941,000
74	WAPUALE	570,201,612.90	587	0.0042	0.0011	241	0.769%	0.27%	9.94	0.65%	0.06%	45.12	0.866%	0.26%	0.70%	42,515,430	612,717,000
75	WAKUMORO	570,201,612.90	1088	0.0079	0.0020	203	0.648%	0.23%	4.66	0.30%	0.03%	27.76	0.533%	0.16%	0.61%	37,273,835	607,475,000
76	BONE TONDO	570,201,612.90	977	0.0071	0.0018	315	1.006%	0.35%	8.98	0.58%	0.06%	42.18	0.809%	0.24%	0.83%	50,410,999	620,613,000
77	BONE KACINTALA	570,201,612.90	1350	0.0098	0.0024	201	0.642%	0.22%	27.06	1.76%	0.18%	35.84	0.688%	0.21%	0.85%	51,687,382	621,889,000
78	BONE LOLIBU	570,201,612.90	888	0.0064	0.0016	353	1.127%	0.39%	11.07	0.72%	0.07%	48.18	0.924%	0.28%	0.90%	54,939,528	625,141,000
79	OELONGKO	570,201,612.90	1413	0.0102	0.0026	334	1.066%	0.37%	10.79	0.70%	0.07%	34.85	0.669%	0.20%	0.90%	54,637,412	624,839,000
80	MATOMBURA	570,201,612.90	1364	0.0099	0.0025	359	1.146%	0.40%	17.26	1.12%	0.11%	40.28	0.773%	0.23%	0.99%	60,248,121	630,450,000
81	LAGHONTOTGHE	570,201,612.90	1564	0.0113	0.0028	332	1.050%	0.37%	5.59	0.36%	0.04%	39.96	0.767%	0.23%	0.92%	55,888,853	626,090,000
82	LAMORENDE	570,201,612.90	537	0.0039	0.0010	81	0.259%	0.09%	78.12	5.08%	0.51%	44.12	0.847%	0.25%	0.95%	57,682,475	627,884,000
83	LAKOLOGOU	570,201,612.90	1643	0.0119	0.0030	452	1.443%	0.51%	13.78	0.90%	0.09%	42.98	0.825%	0.25%	1.14%	69,196,212	639,398,000
84	MATANOOE	570,201,612.90	839	0.0061	0.0015	93	0.297%	0.10%	13.27	0.86%	0.09%	35.65	0.684%	0.21%	0.55%	33,233,963	603,436,000
85	LAPADINDI	570,201,612.90	785	0.0057	0.0014	289	0.923%	0.32%	20.73	1.35%	0.13%	34.00	0.652%	0.20%	0.80%	48,320,373	618,522,000
86	OEMPU	570,201,612.90	3680	0.0266	0.0066	240	0.766%	0.27%	12.32	0.80%	0.08%	32.35	0.621%	0.19%	1.20%	72,861,583	643,063,000
87	FONGKANIWA	570,201,612.90	807	0.0058	0.0015	200	0.638%	0.22%	10.25	0.67%	0.07%	39.83	0.764%	0.23%	0.67%	40,417,531	610,619,000
88	TANJUNG	570,201,612.90	112	0.0008	0.0002	45	0.144%	0.05%	9.39	0.61%	0.06%	67.89	1.303%	0.39%	0.52%	31,742,960	601,945,000
89	UP. KOTA WUNA	570,201,612.90	1478	0.0107	0.0027	431	1.376%	0.48%	10.5	0.68%	0.07%	42.29	0.811%	0.24%	1.06%	64,423,368	634,625,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
90	OENGGUMORA	570,201,612.90	963	0.0070	0.0017	22	0.070%	0.02%	13.78	0.90%	0.09%	52.13	1.000%	0.30%	0.59%	35,739,866	605,941,000
91	KOHLIFANO	570,201,612.90	1218	0.0088	0.0022	248	0.792%	0.28%	17.07	1.11%	0.11%	36.50	0.700%	0.21%	0.82%	49,713,625	619,915,000
92	KAMOSOPE	570,201,612.90	468	0.0034	0.0008	80	0.255%	0.09%	13.49	0.88%	0.09%	36.12	0.693%	0.21%	0.47%	28,528,155	598,730,000
93	LIWUMETINGKI	570,201,612.90	439	0.0032	0.0008	83	0.265%	0.09%	12.43	0.81%	0.08%	51.29	0.984%	0.30%	0.55%	33,304,472	603,506,000
94	LABULAWA	570,201,612.90	495	0.0036	0.0009	56	0.179%	0.06%	12.21	0.79%	0.08%	50.83	0.975%	0.29%	0.52%	31,836,734	602,038,000
95	BUMBU	570,201,612.90	606	0.0044	0.0011	166	0.530%	0.19%	18.46	1.20%	0.12%	35.76	0.686%	0.21%	0.62%	37,718,828	607,920,000
96	KAFO FOO	570,201,612.90	717	0.0052	0.0013	195	0.622%	0.22%	12.07	0.78%	0.08%	34.72	0.666%	0.20%	0.63%	38,019,200	608,221,000
97	LEMBO	570,201,612.90	819	0.0059	0.0015	265	0.846%	0.30%	15.21	0.99%	0.10%	53.30	1.023%	0.31%	0.85%	51,634,720	621,836,000
98	KILAMBIBITO	570,201,612.90	259	0.0019	0.0005	122	0.389%	0.14%	6.49	0.42%	0.04%	65.07	1.248%	0.37%	0.60%	36,453,552	606,655,000
99	BAHUTARA	570,201,612.90	1091	0.0079	0.0020	438	1.398%	0.49%	6.36	0.41%	0.04%	43.85	0.841%	0.25%	0.98%	59,561,585	629,763,000
100	KONTU KOWUNA	570,201,612.90	661	0.0048	0.0012	375	1.197%	0.42%	6.21	0.40%	0.04%	42.13	0.808%	0.24%	0.82%	49,907,850	620,109,000
101	LAHORIO	570,201,612.90	776	0.0056	0.0014	161	0.514%	0.18%	22.56	1.47%	0.15%	37.45	0.719%	0.22%	0.68%	41,457,974	611,660,000
102	MAROBO	570,201,612.90	1416	0.0102	0.0026	777	2.480%	0.87%	13.05	0.85%	0.08%	40.22	0.772%	0.23%	1.44%	87,518,576	657,720,000
103	WADOLAO	570,201,612.90	994	0.0072	0.0018	596	1.903%	0.67%	12.00	0.78%	0.08%	61.12	1.173%	0.35%	1.28%	77,495,491	647,697,000
104	PASIKUTA	570,201,612.90	862	0.0062	0.0016	112	0.358%	0.13%	1.17	0.08%	0.01%	78.04	1.497%	0.45%	0.74%	44,823,915	615,026,000
105	TAPITAPI	570,201,612.90	2032	0.0147	0.0037	820	2.618%	0.92%	1.95	0.13%	0.01%	56.13	1.077%	0.32%	1.62%	98,382,178	668,584,000
106	POAROHA	570,201,612.90	758	0.0055	0.0014	217	0.693%	0.24%	12.23	0.79%	0.08%	44.05	0.845%	0.25%	0.71%	43,289,641	613,491,000
107	WALEALE	570,201,612.90	1554	0.0112	0.0028	284	0.907%	0.32%	8.12	0.53%	0.05%	38.38	0.736%	0.22%	0.87%	52,970,669	623,172,000
108	KALIDAWA	570,201,612.90	382	0.0028	0.0007	93	0.297%	0.10%	55.92	3.63%	0.36%	52.99	1.017%	0.30%	0.84%	51,126,258	621,328,000
109	LABASA	570,201,612.90	1171	0.0085	0.0021	191	0.610%	0.21%	9.31	0.60%	0.06%	31.71	0.608%	0.18%	0.67%	40,586,395	610,788,000
110	WATONDO	570,201,612.90	557	0.0040	0.0010	126	0.402%	0.14%	13.78	0.90%	0.09%	43.23	0.829%	0.25%	0.58%	35,232,724	605,434,000
111	LIANOSA	570,201,612.90	1624	0.0117	0.0029	469	1.497%	0.52%	9.55	0.62%	0.06%	45.83	0.879%	0.26%	1.14%	69,471,284	639,673,000
112	KOLESE	570,201,612.90	994	0.0072	0.0018	141	0.450%	0.16%	11.87	0.77%	0.08%	36.80	0.706%	0.21%	0.63%	38,044,838	608,246,000
113	TAMPUNABALE	570,201,612.90	962	0.0069	0.0017	221	0.705%	0.25%	5.86	0.38%	0.04%	43.19	0.829%	0.25%	0.71%	42,985,062	613,187,000
114	MATA INDAHA	570,201,612.90	842	0.0061	0.0015	16	0.051%	0.02%	10.96	0.71%	0.07%	36.93	0.708%	0.21%	0.45%	27,570,333	597,772,000
115	LAMBELU	570,201,612.90	1232	0.0089	0.0022	394	1.258%	0.44%	18.94	1.23%	0.12%	33.50	0.643%	0.19%	0.98%	59,468,456	629,670,000
116	BONE BONE	570,201,612.90	488	0.0035	0.0009	19	0.061%	0.02%	13.26	0.86%	0.09%	28.50	0.547%	0.16%	0.36%	21,853,237	592,055,000
117	LANOBAKE	570,201,612.90	502	0.0036	0.0009	64	0.204%	0.07%	19.35	1.26%	0.13%	40.38	0.775%	0.23%	0.52%	31,620,221	601,822,000
118	MOOLO	570,201,612.90	1222	0.0088	0.0022	366	1.168%	0.41%	19.35	1.26%	0.13%	29.43	0.565%	0.17%	0.92%	56,197,001	626,399,000
119	BALUARA	570,201,612.90	570	0.0041	0.0010	131	0.418%	0.15%	13.81	0.90%	0.09%	40.18	0.771%	0.23%	0.57%	34,657,438	604,859,000
120	WANGKOLABU	570,201,612.90	492	0.0036	0.0009	48	0.153%	0.05%	1.83	0.12%	0.01%	50.82	0.975%	0.29%	0.45%	27,156,825	597,358,000
121	LAKARAMA	570,201,612.90	1300	0.0094	0.0023	109	0.348%	0.12%	14.26	0.93%	0.09%	40.01	0.768%	0.23%	0.68%	41,291,437	611,493,000
122	MOASI	570,201,612.90	949	0.0069	0.0017	150	0.479%	0.17%	6.23	0.40%	0.04%	41.27	0.792%	0.24%	0.62%	37,494,810	607,696,000
123	RENDA	570,201,612.90	395	0.0029	0.0007	28	0.089%	0.03%	2.13	0.14%	0.01%	48.25	0.926%	0.28%	0.39%	23,954,239	594,156,000
124	BAHARI	570,201,612.90	1619	0.0117	0.0029	171	0.546%	0.19%	2.06	0.13%	0.01%	49.26	0.945%	0.28%	0.78%	47,422,336	617,624,000
Total		70,705,000,000	138,459	100%	25%	31,326	100%	35%	1,539	100%	10%	5,212.11	100%	30%	100%	6,077,349,000	76,782,349,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Muna	76,782,349,000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	70,705,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	6,077,349,000
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN]	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPO	

Pj. BUPATI MUNA,


MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN